



## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 050/Kep.1452-Bappelitbang/2024  
TENTANG

PERLUASAN KELURAHAN LOKUS FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN  
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*  
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lokasi Kelurahan untuk Program Penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kota Bandung untuk Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.2755-Bappelitbang/2023, namun dalam perkembangannya diperlukan perluasan kelurahan lokasi fokus intervensi untuk percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kota Bandung pada tahun 2025 sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perluasan Kelurahan Lokus Fokus Intervensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Di Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 27);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);

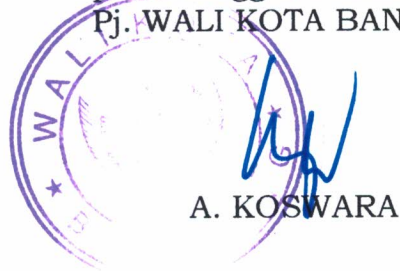
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  2. Berita Acara Penyepakatan Penambahan Lokus Kelurahan Intervensi Stunting Tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perluasan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA** : Perluasan Kelurahan Lokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Kelurahan Lokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi Lokus prioritas bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,



A. KOSWARA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 050/Kep.1452-Bappelitbang/2024  
 TENTANG  
 PERLUASAN KELURAHAN LOKUS FOKUS  
 INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN  
 DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA  
 BANDUNG TAHUN 2025

PERLUASAN KELURAHAN LOKUS FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN  
 PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Kelurahan	STUNTING		
			Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek	Persentase Stunting (%)
1.	Sukasari	Sukarasa	266	35	6,53
2.	Sukasari	Gegerkalong	731	52	9,04
3.	Sukasari	Sarijadi	713	55	6,65
4.	Coblong	Cipaganti	1.175	21	5,65
5.	Coblong	Lebak Gede	2.289	26	7,01
6.	Coblong	Sadang Serang	731	104	9,00
7.	Coblong	Dago	385	107	8,05
8.	Coblong	Sekeloa	1.843	5	0,51
9.	Coblong	Lebak Siliwangi	304	8	5,97
10.	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	3.474	118	11,68
11.	Babakan Ciparay	Babakan	3.726	69	4,50
12.	Babakan Ciparay	Sukahaji	1.018	75	5,83
13.	Babakan Ciparay	Margahayu Utara	1.959	19	3,99
14.	Babakan Ciparay	Margasuka	1.330	48	8,18
15.	Babakan Ciparay	Cirangrang	2.686	26	5,47
16.	Bojongloa Kaler	Kopo	1.385	132	18,70
17.	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	3.030	69	8,54

18.	Bojongloa Kaler	Jamika	2.107	96	11,00
19.	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	2.578	36	6,23
20.	Bojongloa Kaler	Suka Asih	2.037	24	4,26
21.	Andir	Maleber	1.038	20	2,63
22.	Andir	Dungus cariang	1.010	24	3,61
23.	Andir	Ciroyom	2.040	73	7,73
24.	Andir	Kebon Jeruk	735	21	6,80
25.	Andir	Garuda	575	9	2,72
26.	Andir	Campaka	1.480	18	2,38
27.	Cicendo	Husein Sastranegara	1.216	33	4,70
28.	Cicendo	Arjuna	733	8	1,98
29.	Cicendo	Pajajaran	1.305	17	1,38
30.	Cicendo	Sukaraja	1.020	23	2,08
31.	Sukajadi	Pasteur	1.699	42	7,08
32.	Sukajadi	Cipedes	3.260	51	4,33
33.	Sukajadi	Sukawarna	674	14	2,22
34.	Sukajadi	Sukagalih	802	14	2,13
35.	Sukajadi	Sukabungah	1.959	36	4,61
36.	Cidadap	Hegarmanah	2.609	3	0,41
37.	Cidadap	Ciumbuleuit	2.819	17	1,35
38.	Cidadap	Ledeng	1.207	41	10,22
39.	Bandung Wetan	Cihapit	279	3	7,50
40.	Bandung Wetan	Taman Sari	2.009	72	10,73
41.	Bandung Wetan	Citarum	25	-	0,00
42.	Astana Anyar	Karasak	1.332	13	3,07
43.	Astana Anyar	Nyengseret	452	20	4,98
44.	Regol	Cigereleng	709	1	0,35
45.	Regol	Ancol	247	6	2,51
46.	Regol	Pungkur	232	10	7,41
47.	Regol	Balong Gede	622	12	7,95
48.	Regol	Pasir Luyu	170	31	4,99
49.	Batununggal	Gumuruh	1.582	58	7,28
50.	Batununggal	Maleer	1.150	36	4,23
51.	Batununggal	Cibangkong	1.185	93	13,64
52.	Batununggal	Kebonwaru	360	55	10,07

53.	Batununggal	Kebon Gedang	360	36	8,82
54.	Batununggal	Binong	1.022	43	4,39
55.	Lengkong	Lingkar selatan	498	29	7,29
56.	Lengkong	Burangrang	418	14	5,47
57.	Lengkong	Turangga	330	17	6,16
58.	Lengkong	Malabar	411	18	8,29
59.	Lengkong	Cikawao	248	9	4,09
60.	Cibeunying Kidul	Padasuka	976	61	10,22
61.	Cibeunying Kidul	Cikutra	837	57	9,15
62.	Cibeunying Kidul	Cicadas	512	25	4,51
63.	Cibeunying Kidul	Sukamaju	426	28	8,19
64.	Bandung Kulon	Cijerah	2.641	19	2,86
65.	Bandung Kulon	Cibuntu	1.942	41	6,39
66.	Bandung Kulon	Warung Muncang	2.269	76	7,78
67.	Bandung Kulon	Caringin	499	12	4,00
68.	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	2.492	89	9,63
69.	Bandung Kulon	Gempol Sari	1.308	15	2,31
70.	Bandung Kulon	Cigondewah Rahayu	1.049	27	8,13
71.	Bandung Kulon	Cigondewah Kidul	878	31	8,68
72.	Kiaracondong	Sukapura	1.257	121	10,63
73.	Kiaracondong	Kebun Jayanti	611	45	8,24
74.	Kiaracondong	Cicaheum	989	27	3,68
75.	Kiaracondong	Babakan Sari	970	143	9,77
76.	Kiaracondong	Kebon Kangkung	1.246	48	8,36
77.	Bojongloa Kidul	Situsaeur	1.314	67	10,75
78.	Bojongloa Kidul	Kebonlega	558	68	8,73
79.	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	798	43	7,38
80.	Bojongloa Kidul	Mekar Wangi	2.330	15	3,07
81.	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	904	27	5,63
82.	Bojongloa Kidul	Cibaduyut wetan	2.022	6	2,97
83.	Cibeunying Kaler	Cigadung	765	31	2,47

84.	Sumur Bandung	Braga	336	10	6,37
85.	Sumur Bandung	Merdeka	318	7	2,58
86.	Sumur Bandung	Kebon Pisang	848	38	9,45
87.	Antapani	Antapani Tengah	445	56	5,22
88.	Antapani	Antapani Kidul	619	57	5,80
89.	Bandung Kidul	Batununggal	337	43	8,46
90.	Bandung Kidul	Wates	814	63	15,18
91.	Bandung Kidul	Mengger	239	24	8,82
92.	Bandung Kidul	Kujang Sari	297	59	8,94
93.	Buahbatu	Sekejati	562	19	5,18
94.	Buahbatu	Margasari	1.457	184	11,98
95.	Buahbatu	Cijaura	1.113	115	11,33
96.	Rancasari	Cipamokolan	578	74	6,74
97.	Rancasari	Derwati	294	90	11,45
98.	Rancasari	Mekarjaya	555	84	9,77
99.	Arcamanik	Sukamiskin	721	83	11,23
100.	Arcamanik	Cisaranten Kulon	356	59	5,86
101.	Arcamanik	Cisaranten Endah	579	44	6,07
102.	Cibiru	Palasari	838	96	10,81
103.	Cibiru	Cipadung	645	109	11,63
104.	Cibiru	Pasir Biru	491	45	5,11
105.	Cibiru	Cisurupan	514	60	7,59
106.	Ujung Berung	Pasir Wangi	701	56	6,52
107.	Ujungberung	Pasirjati	725	68	6,98
108.	Ujungberung	Pasanggrahan	1.002	98	9,20
109.	Gedebage	Cisaranten Kidul	636	6	0,61
110.	Gedebage	Rancabolang	559	2	0,31
111.	Panyileukan	Cipadung Kulon	85	61	8,97
112.	Panyileukan	Cipadung Kidul	1.661	71	13,03
113.	Panyileukan	Cipadung wetan	99	25	10,55
114.	Panyileukan	Mekar Mulya	212	21	5,72
115.	Cinambo	Cisaranten wetan	811	45	12,86
116.	Cinambo	Babakan Penghulu	390	53	13,52
117.	Mandalajati	Jatihandap	1.703	88	5,87

118.	Mandalajati	Karang Pamulang	222	42	4,56
119.	Mandalajati	Pasir Impun	692	66	8,63
120.	Mandalajati	Sindang Jaya	706	40	5,95

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

